

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan mengenai perdamaian dunia menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan terutama setelah pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1941-1945. Refleksi atas kengerian dampak kerusakan akibat PD II tersebut, melahirkan gagasan tentang perlunya mencegah terulangnya tragedi hidup manusia. Bangsa-bangsa di dunia berupaya bekerjasama menjaga terciptanya perdamaian sekaligus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang memicu terjadinya perang. Kesadaran ini menumbuhkan keinginan masyarakat dunia untuk membangun kembali kerjasama internasional dan upaya-upaya penyelesaian konflik serta permasalahan-permasalahan internasional lainnya. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dengan melibatkan anggota PBB, dimana Indonesia termasuk di dalamnya dan ikut terlihat dalam berbagai upaya untuk menjaga perdamaian dan mengatasi konflik antar negara-negara di dunia.

Berkaitan dengan peranan Indonesia pada penyelesaian konflik luar negeri, menurut Setiawati (2016) ada empat peranan yang dapat diambil Indonesia dalam penyelesaian suatu konflik antar Negara atau kelompok, yaitu sebagai: *pertama* mediator atau penengah pihak yang berkonflik, *kedua* fasilitator yaitu memberi fasilitas pada pihak yang konflik untuk berunding, *ketiga* partisipan yaitu terlibat langsung untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencegah supaya tidak muncul

konflik baru misal sebagai pasukan penjaga perdamaian, dan sebagai keempat justifikator yaitu memberi justifikasi penyelesaian konflik.

Dalam hal penyelesaian konflik antara negara-negara Arab-Israel, Indonesia telah menunjukkan peranannya terutama sebagai partisipan atau pihak yang berpartisipasi aktif mengimplementasikan perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Sinai Pasca Perang Sinai 1956 yang tergabung di dalam UNEF (*United Nations Emerging Forces*), dan ke Lebanon khususnya setelah serangan Israel atas Lebanon Selatan di tahun 2006 yang kemudian tergabung dalam pasukan Perdamaian PBB UNIFIL (*United Nations Interim Forces in Lebanon*).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,5%, Indonesia merasa memiliki kedekatan hubungan dengan Lebanon maupun dengan negara-negara Arab lainnya yang merupakan negara tempat lahirnya Agama Islam. Selain itu, keterikatan Indonesia dengan Lebanon muncul dikarenakan Lebanon merupakan salah satu dari beberapa negara Arab (Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon, dan negara Liga Arab) yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adanya kedekatan secara agama dan historis inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia merasa perlu membantu Lebanon dan negara-negara Arab yang lain dalam menyelesaikan berbagai konflik baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan sejarah, konflik yang terjadi antara Lebanon dan Israel bermula ketika Hizbullah melakukan penyerangan lewat udara ke wilayah Israel Utara yaitu kota Shlomi dan juga menembakan roket Angkatan Pertahanan Israel IDF (*Israeli Defence Force*). IDF yang

sedang melakukan patroli di perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara IDF tewas serta ditangkapnya dua tentara lainnya (Ehud Goldwasser dan Elgad Regev). Tentara Hizbullah juga menembakkan roket dan mortir secara beruntun ke wilayah utara Israel lainnya sebagai suatu pengalihan perhatian pada waktu yang sama.

Selanjutnya Israel memberikan balasan dengan menyerang Lebanon berdasarkan alasan bahwa terdapat dua tentara Israel yang tewas pada serangan yang dilancarkan Hizbullah. Menurut pejabat Israel diduga kedua tentara itu dibawa ke Iran. Hizbullah berencana melakukan penukaran tawanan dalam membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan Israel. Serangan besar Israel ini diluar dugaan Hizbullah yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan membalasnya dengan Operasi Komando untuk membalas menculik anggota Hizbullah, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Tampaknya Israel telah lama mempersiapkan serangan ini atas dukungan dari Amerika Serikat, sebagai penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel yang disandera. Israel juga menuduh Hizbullah telah menembakan 130 roket yang menyebabkan belasan warga Israel tewas dan ratusan terluka. Pada saat yang sama, milisi Hizbullah juga meminta agar Israel segera mengakhiri agresinya di wilayah Palestina. Namun, Israel menolak untuk berkompromi dan tetap melancarkan serangannya. Serangan yang dilancarkan oleh Israel juga mengenai beberapa lokasi yang sebagai

jalur bagi Kopral Gilad Shalit untuk melarikan diri dari tempat penyanggapannya di selatan Gaza (www.globalresearch.ca).

Selain dari darat, militer Israel menggempur Beirut dari udara. Sebuah kawasan pinggiran kota yang banyak dihuni kelompok Hizbullah hancur. Jembatan di wilayah Akkar, beberapa tempat di lembah Bekaa, serta ruas jalan dekat perbatasan Suriah juga tidak luput dari serangan peluru kendali Israel). Akibatnya distribusi makanan dan obat-obatan bagi warga sipil sulit disalurkan. Menurut Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora, dalam serangan itu sepertiga dari jumlah korban tewas berusia di bawah 12 tahun. Satu juta warga Lebanon atau seperempat populasinya telah kehilangan tempat tinggal (Yulianto, 2010).

Selain itu, Israel juga menyerang Lebanon pada tanggal 5-6 Agustus 2006. Israel antara lain menggempur kota Tirus, Nakburah dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Israel juga menyerang markas Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) di Lembah Bekaa. Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya lima penduduk dan 12 lainnya luka-luka di Desa Al-Ansar dekat Nabatiyeh. Menurut laporan AFP, kelimanya tewas ketika rudal Israel jatuh di sebuah rumah. Selain itu, tiga orang tewas di Nakoura, Lebanon Selatan. Mereka juga tewas akibat tembakan rudal Israel (Yulianto, 2010).

Mengenai konflik yang terjadi di Lebanon tersebut, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian ke Lebanon tidak dapat dilepaskan dari jati diri bangsa Indonesia yang bercita-cita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Idealisme bangsa Indonesia ini terdapat pada nilai-nilai Pembukaan UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga memiliki karakter politik luar negeri yang bebas aktif yang turut serta

memberikan dorongan untuk terlibat aktif pada upaya dan proses perdamaian dunia.

Dalam menjalankan ideologinya tersebut, Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian dalam misi perdamaian PBB. Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai UN PKO (sesuai data *United Nations Department of Peacekeeping Operations* per 30 November 2015) adalah sejumlah 2.840 personel, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 124 *Troops/Police Contributing Countries* (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 10 (sepuluh) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan) (Kemelu.go.id, 2016)

Pengiriman pasukan perdamaian TNI pada misi perdamaian PBB dapat menjadi representasi sebuah negara. Pasukan perdamaian Indonesia pada misi perdamaian PBB dapat menjadi jembatan hubungan antara Indonesia dengan Negara lain yang ikut mengirimkan pasukannya pada misi perdamaian PBB.

Lebanon merupakan salah satu wilayah yang menjadi tujuan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia secara reguler. Di wilayah tersebut, pasukan perdamaian Indonesia mampu merepresentasikan jati diri bangsa Indonesia yaitu bercita-cita mewujudkan perdamaian dunia. Pasukan perdamaian Indonesia mampu memainkan perannya dengan baik yang terlihat dari penerimaan masyarakat Lebanon pada pasukan perdamaian Indonesia. Penerimaan tersebut menjadi fenomena yang

menarik sebab terdapat kontingen pasukan perdamaian PBB yang berasal dari negara lain sulit diterima oleh masyarakat di Lebanon Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang, penulis merumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.

C. Kontribusi Riset

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kontribusi dari penelitian yang ingin dicapai:

1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan kontribusi permasalahan politik luar negeri khususnya yang berkaitan dengan peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan luar negeri yang berkaitan upaya penyelesaian konflik antar negara atau kelompok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbelakang, maka rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana peranan pasukan

perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012?

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Hal ini berbeda dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut pemaparan beberapa riset terdahulu yang berkaitan dengan konflik luar negeri:

Pertama, penelitian Rachmat (2016) yang bertujuan untuk menganalisis praktek diplomasi politik yang dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon. Hasil penelitian menemukan bahwa praktek diplomasi yang gencar dijalankan oleh negara-negara di dunia dengan beragam cara berhasil menyadarkan Indonesia arti penting dari praktek diplomasi publik. Praktek diplomasi publik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan mengikut sertakan pasukan TNI pada pasukan penjaga perdamaian PBB. Pengiriman pasukan TNI pada pasukan perdamaian PBB memberikan dua keuntungan bagi Indonesia yaitu menciptakan keamanan bagi perdamaian dunia dan menguatkan citra Indonesia sebagai sebuah Negara dengan memperkenalkan diri di Negara lokasi pengiriman pasukan.

Kedua, penelitian Sirmareza (2017) yang membahas tentang partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL MTF sebagai misi matra laut pertama dan satu-satunya di dunia sebagai sebuah naval diplomacy. Kajian-kajian terdahulu belum banyak menggunakan teori Ken Booth untuk mengembangkan *naval diplomacy* Indonesia, khususnya dalam pengiriman Satgas Maritim TNI. Oleh karena itu, penting untuk

menganalisis *naval diplomacy* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI dan kontribusinya terhadap pencapaian kepentingan nasional dan sasaran kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan dua kepentingan utama, yaitu pemeliharaan ketertiban dunia itu sendiri sebagaimana dijamin konstitusi, serta meningkatkan peran globalnya sebagai *middle power*. Dalam perspektif appropriateness yang dikemukakan Ken Booth, Satgas Maritim TNI memiliki fleksibilitas, mobilitas kemampuan proyeksi dan potensi akses untuk membawa misi diplomatik Indonesia. Secara empiris, Satgas Maritim TNI dalam derajat tertentu mendukung agenda-agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, dipandang dari aspek simbolisme, peningkatan kuantitas perlu dipertimbangan agar Satgas Maritim TNI dapat menjadi signifier prestise dan komitmen internasional Indonesia yang maksimal.

Ketiga, penelitian Hutabarat (2015) yang membahas tentang partisipasi pasukan TNI dalam Pasukan Perdamaian PBB instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam membahas instrument kebijakan luar negeri Indonesia yang berupa pengiriman pasukan perdamaian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya diplomasi yang pada dijalankan oleh Indonesia melalui pengiriman pasukan pada pasukan perdamaian PBB. Keterlibatan Indonesia ini dapat menjadi menguatkan ciri kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pengiriman pasukan Indonesia pada operasi perdamaian dunia dapat memberikan keuntungan pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menyusun kebijakan nasional yang dapat

meningkatkan kepentingan nasional Indonesia pada misi perdamaian PBB

Keempat, penelitian Islamiyah dan Trilaksana (2016) yang bertujuan untuk mengetahui (1) Apa upaya-upaya yang telah dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, (2) Bagaimana implementasi kebijakan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, dan (3) Bagaimana dampak kebijakan PBB, bagi Palestina maupun Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PBB dinilai tidak efektif hal tersebut dapat dinilai ketika upaya PBB dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak berhasil dijalankan oleh pihak yang bersengketa. Perdamaian dan keamanan jauh dari cita-cita khususnya keikutsertaan Amerika Serikat dalam menggagalkan Veto terkait perdamaian Timur Tengah dan lebih mendukung Israel merdeka tanpa melihat dari segi Palestina. Hambatan lain yakni kurangnya dukungan dari bangsa Arab sendiri dimana terjadi konflik internal yang terjadi antara Hamas dan Fattah yang memiliki perbedaan pandangan sehingga konflik ini sulit diselesaikan.

Berikut tabel yang menjelaskan secara ringkas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penulisan tesis ini:

Tabel 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Hasil
1	Rachmat (2016) “Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ UNIFIL Tentara Nasional Indonesia di Lebanon Selatan”	Diplomasi publik Indonesia melalui kontingan Garuda/ UNIFIL	Praktek diplomasi yang gencar dijalankan oleh negara-negara di dunia dengan beragam cara berhasil menyadarkan Indonesia arti penting dari praktek diplomasi publik. Praktek diplomasi publik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan mengikut sertakan pasukan TNI pada pasukan penjaga perdamaian PBB. Pengiriman pasukan TNI pada pasukan perdamaian PBB memberikan dua keuntungan bagi Indonesia yaitu menciptakan keamanan bagi perdamaian dunia dan menguatkan citra Indonesia sebagai sebuah Negara dengan memperkenalkan diri di Negara lokasi pengiriman pasukan
2	Sirmareza (2017) “Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon”	Partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL MTF	Indonesia menekankan dua kepentingan utama, yaitu pemeliharaan ketertiban dunia itu sendiri sebagaimana dijamin konstitusi, serta meningkatkan peran globalnya sebagai middle power. Dalam perspektif appropriateness yang dikemukakan Ken Booth, Satgas Maritim TNI memiliki fleksibilitas, mobilitasm kemampuan proyeksi dan potensi akses untuk membawa misi diplomatik Indonesia. Secara empiris, Satgas Maritim TNI dalam derajat tertentu mendukung agenda-agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, dipandang dari aspek simbolisme, peningkatan kuantitas perlu dipertimbangan agar Satgas Maritim

No	Penelitian	Variabel	Hasil
			TNI dapat menjadi signifikan prestise dan komitmen internasional Indonesia yang maksimal.
3	HUTABARAT (2015) “Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia”	Partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia	Pentingnya diplomasi yang pada dijalankan oleh Indonesia melalui pengiriman pasukan pada pasukan perdamaian PBB. Keterlibatan Indonesia ini dapat menjadi menguatkan ciri kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pengiriman pasukan Indonesia pada operasi perdamaian dunia dapat memberikan keuntungan pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menyusun kebijakan nasional yang dapat meningkatkan kepentingan nasional Indonesia pada misi perdamaian PBB.
4	Islamiyah dan Trilaksana (2016) “Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995”	Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel	Peranan PBB dinilai tidak efektif hal tersebut dapat dinilai ketika upaya PBB dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak berhasil dijalankan oleh pihak yang bersengketa. Perdamaian dan keamanan jauh dari cita-cita khususnya keikutsertaan Amerika Serikat dalam menggagalkan Veto terkait perdamaian Timur Tengah dan lebih mendukung Israel merdeka tanpa melihat dari segi Palestina. Hambatan lain yakni kurangnya dukungan dari bangsa Arab sendiri dimana terjadi konflik internal yang terjadi antara Hamas dan Fattah yang memiliki perbedaan pandangan sehingga konflik ini sulit diselesaikan.

F. Telaah Teoritik

1. UN Peacekeeping

Peacekeeping merupakan suatu teknik yang dikembangkan oleh PBB dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata. Pasukan perdamaian PBB yang bernama *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) merupakan operasi *Peacekeeping* PBB yang pertama. UNTSO terdiri pengamat militer tidak bersenjata yang dikirim ke Palestina pada tahun 1948. Pengiriman pasukan *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) oleh PBB untuk mengawasi kesepakatan yang dilakukan oleh Count Bernadotte dalam perang pertama Israel dan Arab. Selain *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO), PBB juga pernah membentuk pasukan bersenjata *United Nations Emergency Force* (UNEF) yang ditugaskan di Mesir pasca serangan Anglo-French-Israeli pada bulan Oktober 1956.

Peacekeeping dapat disimpulkan dalam 5 (lima) prinsip, yaitu:

- a. *Peacekeeping operation* sebagai operasi yang dibentuk PBB, dapat diterima di setiap negara anggota dimana terdapat pasukan asing yang berada di wilayah kawasan negara tersebut.
- b. *Peacekeeping operation* selama ini dapat dilakukan dengan menfokuskan pada pihak-pihak yang sedang berkonflik. Selain itu, *peacekeeping operation* juga berkonsentrasi pada usaha menciptakan kerjasama diantara pihak-pihak yang bertikai.
- c. *Peacekeepers* harus bersikap netral dan tidak memihak di antara kelompok yang bertika. Selain itu, keberadaan pasukan PBB

tidak berupaya untuk memaksakan kepentingan satu kelompok terhadap kelompok yang lain.

- d. Pada upaya *peacekeeping operation*, setiap Negara anggota memiliki komitmen untuk menyediakan pasukan pada upaya *peacekeeping operation*.
- e. *Use of force*. Sebelum tahun 1988, operasi *peacekeeping* yang terdiri dari pengamat militer yang tidak bersenjata. Namun sekarang, pada saat terjadi pertempuran dapat menggunakan senjata dengan seminimal mungkin yang hanya dilakukan untuk upaya pembelaan diri.

Operasi *peacekeeping* dapat menjadi penolong bagi Negara-negara yang mengalami permasalahan akibat terjadinya konflik. Operasi *peacekeeping* terus berupaya untuk menciptakan kondisi aman. Hal ini telah terbukti bahwa operasi *peacekeeping* dapat menjadi instrument yang paling efektif dalam membantuk yang terkena dampak konflik untuk menuju perdamaian. Operasi *peacekeeping* memiliki kemampuan yaitu *legitimacy*, *burden sharing*, *and an ability to deploy and sustain troops and police* yang berasal dari seluruh dunia; berintegrasi dengan *civilian peacekeepers*; dan mampu memberikan *advance multidimensional mandates*. Operasi *peacekeeping* PBB terus berupaya untuk menyediakan keamanan, dukungan politik, dan *peacebuilding support* kepada Negara yang mengalami konflik untuk menuju perdamaian.

Terdapat lima faktor yang mendorong berbagai Negara untuk terlibat dan berkontribusi pada pasukan perdamaian PBB yaitu:

- a. Politik.

Partisipasi Negara dengan mengirimkan pasukan pada pasukan penjaga perdamaian dapat membantu untuk memenuhi tujuan politik. Hal ini dikarenakan Negara-negara yang terlibat dalam operasi perdamaian mendapatkan penghargaan dan hak dalam menyuarakan isu keamanan di forum internasional (Sotomayor, 2010). Selain itu, juga terdapat beberapa alasan politik yang menyebabkan sejumlah Negara mengirimkan pasukannya pada operasi perdamaian PBB antarlain tekanan atau ajakan oleh negara besar atau Sekjen PBB. Selain itu adanya persepsi bahwa kontribusi pada operasi perdamaian PBB mampu memperkuat *national prestige* negara (Findlay, 1996).

b. Ekonomi.

Bagi Negara yang berpartisipasi dengan mengirimkan pasukannya pada operasi keamanan PBB akan mendapatkan insentif ekonomi berupa pembayaran kompensasi PBB bagi negara yang menyediakan pasukan bagi operasi keamanan PBB.

c. Keamanan.

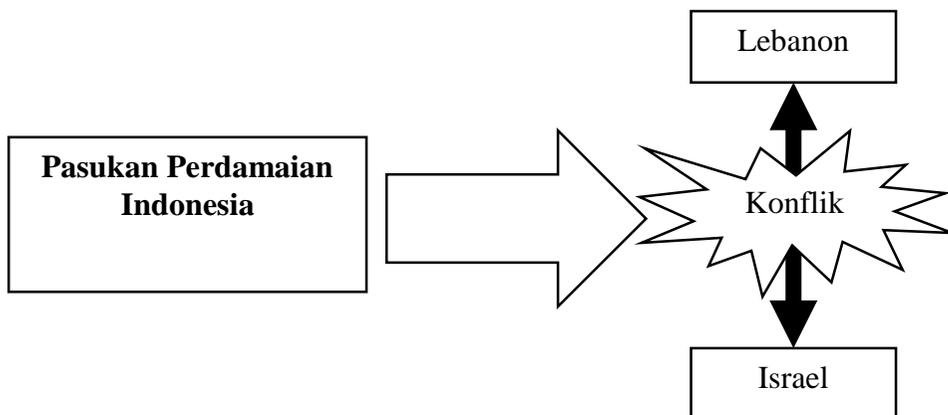
Operasi penjaga perdamaian PBB tidak selalu diasosiasikan dengan pertahanan nasional atau kepentingan utama keamanan nasional. Negara biasanya memiliki pandangan bahwa penyediaan pasukan PBB akan mempromosikan kepentingan keamanan nasionalnya yang lebih luas (Findlay, 1996). Dalam hal ini, tingkat persepsi ancaman dalam konflik tertentu dapat menjadi pendorong utama terkait keputusan untuk memberikan kontribusi Pasukan PBB. Kedekatan wilayah juga berperan penting dalam menerima kontribusi dari negara tetangga atau kawasan terdekat. Terdapat juga satu kemungkinan dimana

negara-negara lebih besar dengan pola pikir internasionalis berpandangan bahwa kepentingan keamanan nasionalnya berada dalam konteks yang lebih global.

- d. Institusi. Partisipasi dalam Pasukan PBB dapat berakar dari motivasi yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, sektor keamanan, dan dinamika birokrasi suatu negara. Keputusan untuk terlibat dalam operasi PBB biasanya diambil dalam konteks hubungan sipil-militer (Sotomayor, 2010). Terdapat juga argumen bahwa besar, kualitas, dan postur angkatan bersenjata berkaitan dengan kontribusi negara tersebut pada operasi perdamaian PBB. Selain itu, pihak militer juga melihat operasi perdamaian PBB sebagai suatu hal yang menarik karena memberikan pengalaman internasional yang berharga bagi personel terkait, pandangan lain terkait hal ini adalah bahwa ini merupakan salah satu upaya “militer sibuk di luar negeri daripada terlibat dalam urusan domestik” suatu negara, atau rehabilitasi setelah periode kepemimpinan yang sebelumnya otoriter. Sementara bagi sebagian negara, partisipasi dalam operasi perdamaian PBB dapat juga dilihat sebagai peran yang memiliki prestige setelah Perang Dingin. Partisipasi ini dapat mencegah pemotongan anggaran militer secara signifikan akibat situasi damai pasca berakhirnya Perang Dingin.
- e. Norma. Negara memberikan kontribusi pada Pasukan PBB dapat didasarkan pada alasan normatif. Alasan ini khususnya untuk “*self-images*” sebagai “*global good Samaritans*”, “*good international citizens*”, atau sebagai anggota grup “*non-aligned*” dari negara yang mendukung PBB sebagai alternatif terhadap

hegemoni “*great power*”, atau sebaiknya merupakan hal yang seharusnya dilakuka . sementara beberapa negara mempertahankan komitmen prinsipnya pada PBB dengan melihatnya sebagai “*legitimate system*” dari mana manajemen konflik mengharapkan peran pendukung sebagai “*good international citizen*”. Indonesia dalam perannya sebagai kontributor, secara normatif berkomitmen pada tujuan keamanan dan perdamaian PBB yang sejalan dengan konstitusi pada Pembukaan UUD 1945, alinea keempat. India memandang PBB sebagai suatu alternatif terhadap *great power hegemony* dan instrumen “*nonaligned approach*” terhadap keamanan dan perdamaian. Pandangan ini juga tampak dalam keterlibatan Brazil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

G. Kerangka Berfikir



Gambar 1 Kerangka Berfikir

H. Hipotesa

Hipotesa yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Lebanon mampu meningkatkan citra Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat.
2. Kegiatan yang dilakukan oleh kontingen pasukan perdamaian Indonesia di mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Lebanon pasca konflik.
3. Pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda/UNIFIL tidak segan-segan untuk berbaur dengan masyarakat.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian pada saat sekarang secara apa adanya. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel tetapi menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya (Sukmadinata, 2011). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2011), adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

2. Jangkauan Penelitian

Permasalahan merupakan sebuah objek untuk diteliti sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru. Menurut Umar (2005:303) objek penelitian menjelaskan tentang pada apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda.

Dalam penelitian ini mengangkat peran Pasukan Perdamaian Indonesia dalam penyelesaian konflik Lebanon sebagai objek. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa peran Pasukan Perdamaian Indonesia dalam penyelesaian konflik Lebanon mempunyai data yang diperlukan untuk penelitian ini. Objek dalam ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: objek material dan objek formal. Pertama, yang dimaksud objek material adalah sasaran material atau penyelidikan, pemikiran atau penelitian ilmu. Menurut Surajiyo (2008:5), Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek ini merupakan hal yang dipandang, disorot, atau dipermasalahkan oleh suatu disiplin ilmu. Objek ini mencakup hal-hal yang bersifat konkret (seperti makhluk hidup dan benda mati) maupun abstrak (seperti keyakinan dan nilai-nilai).

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer tersebut dilakukan dengan cara wawancara mendalam.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

Penulis memanfaatkan data sekunder hasil kutipan dari sumber lain, seperti KBRI, naskah pidato, naskah perjanjian-perjanjian, jurnal, koran, karya ilmiah, makalah, buku dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik bahasan juga menggunakan data sekunder yang dihasilkan dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon sebagai objek. Sumber Sumber-sumber ini dipilih dan dianalisis sedemikian rupa untuk memperoleh rujukan yang benar-benar otentik dan objektif terkait dengan permasalahan. Juga dengan mengambil beberapa pandangan yang berbeda dari beberapa karya kemudian

dilakukan pemilihan secara objektif berdasar data yang dimiliki oleh peneliti.

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian dibutuhkan peneliti untuk mencari data beserta informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Data dan informasi yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan subjek tunggal yaitu Dedi Irwanto Nugroho yang pernah bergabung pada Kontingen Garuda sebagai pasukan perdamaian PBB.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang akan disajikan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2012). Wawancara selain berfungsi untuk deskriptif, dapat pula berfungsi eksploratif yaitu bila masalah yang kita hadapi masih samar-samar karena belum pernah diselidiki secara mendalam oleh orang lain.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan padapercakapan secara intensif dengan tujuan tertentu. Atau dapat dikatakan sebagaibentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi (Mulyana, 2008).

Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan secara bebas terpimpin. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subyek penelitian sudah dipersiapkan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi cara penyampaian pertanyaan tersebut dilangsungkan secara bebas. Dengan demikian sekalipun pewawancara telah terikat oleh pedoman wawancara (*interview guide*), tetapi pelaksanaannya dapat berlangsung dalam suasana tidak terlalu formal, harmonis, dan tidak kaku. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh data-data yang diinginkan langsung dari subyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

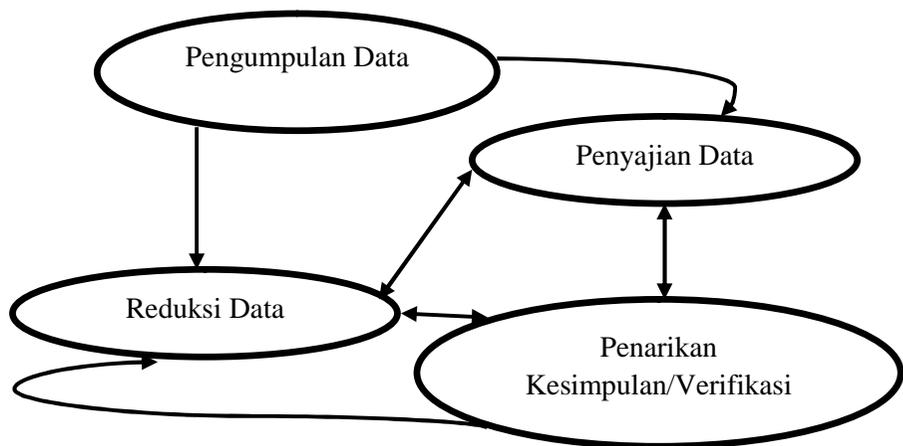
Informasi yang bersumber dari pustaka, peneliti peroleh dari laporan KBRI, naskah-naskah perjanjian, naskah pidato, koran, majalah, karya ilmiah, makalah, buku dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik bahasan.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012) analisis data adalah kegiatan setelah seluruh data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan

untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman (Idrus, 2007). Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Idrus, 2007

Gambar 2 Analisis Interaktif

Setiap peneliti harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan tersebut. Hal ini dikarenakan metode analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung

selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan baru berhenti saat penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan (Idrus, 2007). Berikut penjelasan masing-masing proses dalam analisis data model interaktif.

a. Pengumpulan Data

Bentuk data dari hasil penelitian kualitatif tidak hanya dalam bentuk kata-kata melainkan bisa berbentuk dokumen pribadi, foto, pengalaman pribadi, sejarah hidup dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bisa menjadi partisipan observarian, dalam arti peneliti terlibat langsung dalam proses pengambilan data dilapangan. Guna melakukan wawancara dengan informan kunci peneliti harus mengajukan pertanyaan yang mencakup 5W+1H yang dikembangkan secara lebih detail.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap Reduksi data bisa diartikan sebagai sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul pada catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian kualitatif meskipun data masih tergolong sedikit harus segera dilakukan reduksi data agar memudahkan peneliti dalam mengelompokkan data sesuai dengan topik penelitian.

c. Penyajian Data

Display data bisa dikatakan sebagai proses penyampaian data. Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data

adalah sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Bisa juga diartikan sebagai penarikan arti terhadap data yang telah ditampilkan. Pemberian ini akan memberikan interpretasi bagi peneliti dalam prose penarikan kesimpulannya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat dan proposisi.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I , Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Dinamika Konflik Lebanon. Bab ini menggambarkan tentang dinamika kebijakan dinamika konflik yang terjadi di Lebanon.

BAB III, Politik Keterlibatan Indonesia Dalam Perdamaian Dunia. Bab ini berisi gambaran umum mengenai politik dan peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia.

BAB IV, Peranan Pasukan Perdamaian Indonesia dalam Misi Keamanan Di Lebanon. Bab ini akan membahas tentang peranan

pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2009-2012.

BAB V, Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.